



Pemerintah Kabupaten Gresik
Kecamatan Sidayu



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025



Kantor Kecamatan Sidayu
Jl. Pahlawan No. 55 Sidayu Gresik

kecsidayu.gresikkab.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan di lingkungan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, 25 Februari 2026

CAMAT SIDAYU



SUWARTONO, AP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19721116 199311 1 002

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4. Personil / Pegawai	12
1.5. Isu Strategis	16
1.6. Dasar Hukum	16
1.7. Sistematika Penyusunan	17
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	19
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	24
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	28
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
3.3. Realisasi Anggaran	44
BAB IV : P E N U T U P	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Sidayu	13
1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Pendidikan	14
2.1. Indikator Kinerja Kecamatan Sidayu Renstra 2021-2026.....	21
2.2. Indikator Kinerja Kecamatan Sidayu Renstra 2025-2029.....	22
2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidayu Renstra 2021-2026.....	25
2.4. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidayu Renstra 2025-2029.....	25
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sidayu	26
3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja APBD 2025.....	29
3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja PAPBD 2025.....	29
3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya Renstra 2021-2026	31
3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya Renstra 2025-2029	31
3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026.....	34
3.7. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra 2025-2029.....	34
3.8. Analisis Survey Kepuasan Masyarakat	36
3.9. Pengukuran Capaian Dibandingkan Dengan Rata-rata Capaian Daerah Lain Renstra 2021-2026.....	38
3.10. Pengukuran Capaian Dibandingkan Dengan Rata-rata Capaian Daerah Lain Renstra 2025-2029.....	39
3.11. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Renstra 2021- 2026.....	40
3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Renstra 2025-	

2029.....	41
3.13. Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan Renstra 2021-2026.....	43
3.14. Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan Renstra 2025-2029.....	44
3.15. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Renstra 2021-2026.....	45
3.16. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Renstra 2025-2029.....	45
3.17. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Renstra 2021-2026.....	48
3.18. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Renstra 2025-2029.....	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Hal
1.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Sidayu	13
1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	15
3.1. Perbandingan Capaian Kinerja	31



BAB I

PENDAHULUAN

-  **Latar Belakang**
 -  **Maksud dan Tujuan**
 -  **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
 -  **Personel / Pegawai**
 -  **Isu Strategis**
 -  **Dasar Hukum**
 -  **Sistematika Penyusunan**
- 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sidayu tahun 2025 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sidayu dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Sidayu punnya

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik periode Tahun 2021 – 2026 dan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidayu Kabupaten

Gresik periode Tahun 2025 – 2029 . Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun

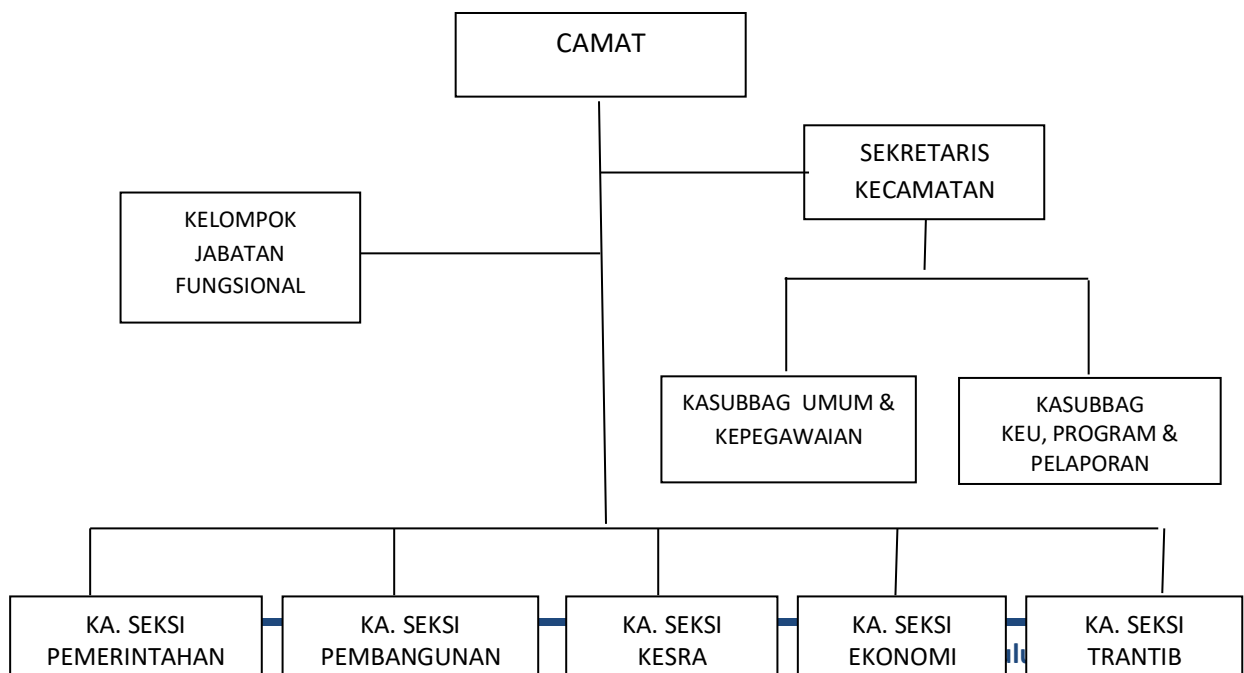
2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Sidayu sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik



Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik meliputi :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;

- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:

- a. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. mengelola keuangan kecamatan;
- e. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- g. pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;

- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. SEKSI EKONOMI

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;

- i. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;

- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

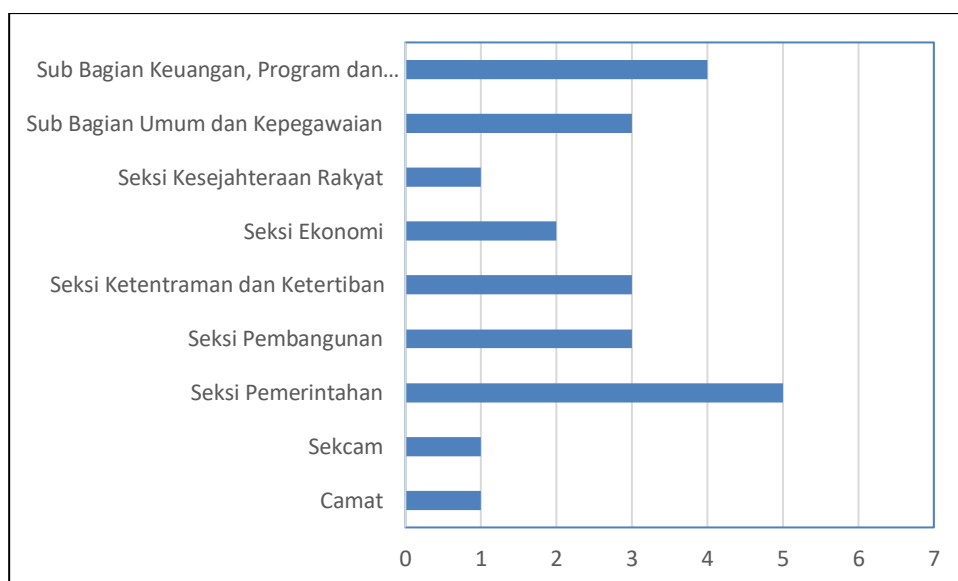
1.4. PERSONIL / PEGAWAI

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 16 orang dan pegawai non PNS sebanyak 5 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 21 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Keadaan: 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Seksi Pemerintahan	5
4	Seksi Pembangunan	3
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	3
6	Seksi Ekonomi	2
7	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	4
Total		21

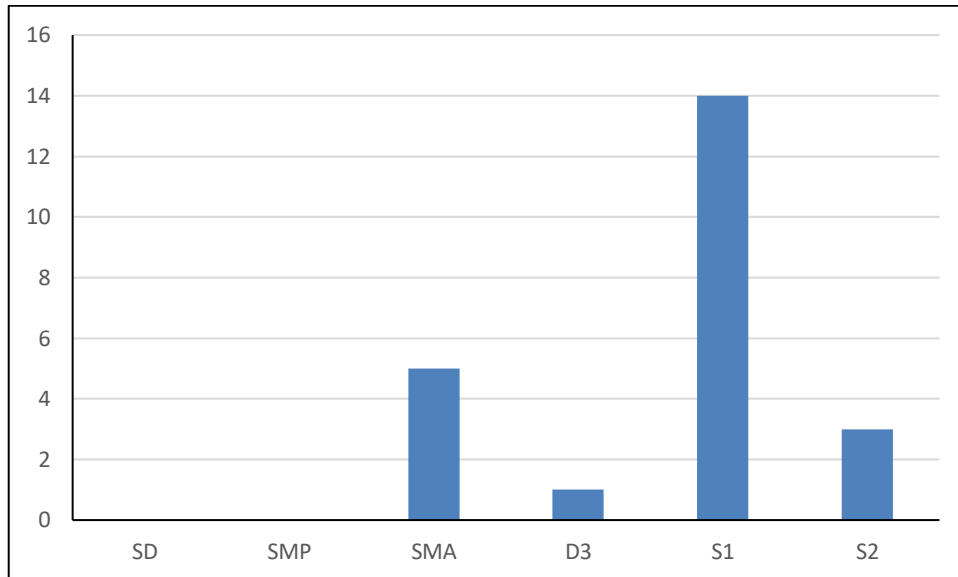
Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Sidayu
Keadaan: 31 Desember 2025



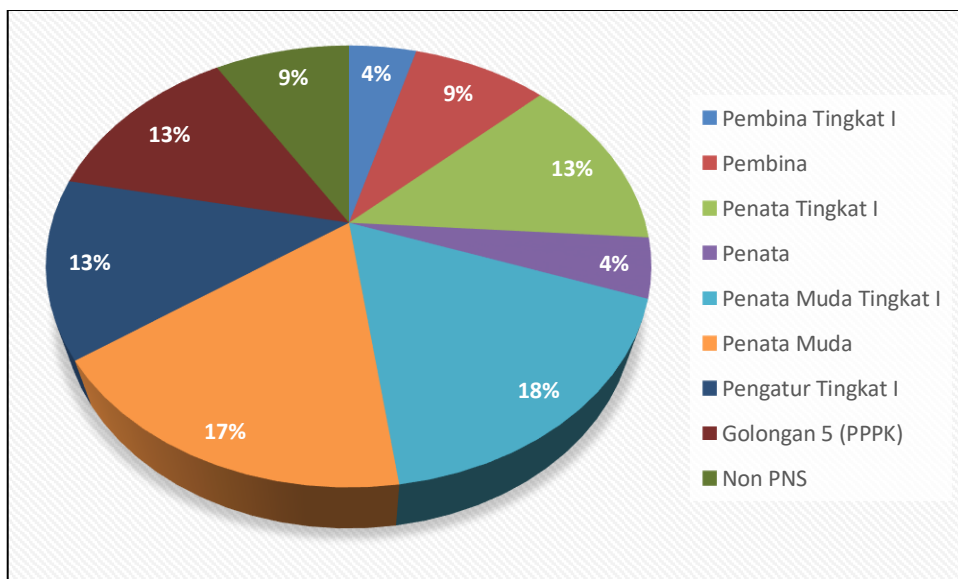
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Pendidikan
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							
	Pengatur (IIc)							
	Pengatur Tingkat I (IId)			2	1			3
3.	Penata Muda (IIIa)					4		4
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)					4		4
	Penata (IIIC)					1		1
	Penata Tingkat I (IIId)					2	1	3
4.	Pembina (Iva)					1	1	2
	Pembina Tingkat I (Ivb)						1	1
	Pembina Utama Muda (Ivc)							
	Pembina Utama Madya (Ivd)							
	Pembina Utama (Ive)							
5.	Golongan 5 (PPPK)			3				3
6.	Non PNS					2		2
	JUMLAH			5	1	14	3	23

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Tahun 2025



Grafik 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Tahun 2025



1.5. ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu - isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sidayu antara lain :

1. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
2. Semakin tingginya tuntutan dalam fungsi kewilayahan
3. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manajemen Pemerintahan desa semakin dibutuhkan

1.6. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 , dan Dokumen Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 dan PAPBD 2025.

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025; perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan dokumen Renstra Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029. Analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 2025 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

-  **Rencana Strategis**
 -  **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**
 -  **Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025**
- 

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan isu-isu strategis, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian kinerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja, Kecamatan Sidayu memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

Pada Tahun 2025, terdapat 2 (dua) periode Rencana Strategis yang berjalan yaitu Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Tahun 2025, Kinerja Utama pada setiap periode akan dianalisis.

2.1.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Visi dari Kabupaten Gresik untuk Periode Renstra 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**. Berlandaskan visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021 - 2026 yang dipakai Kecamatan adalah misi yang ke 1 (satu) sebagai berikut : **“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif “**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Gresik sesuai RPJMD 2021-2026 dan berdasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, ditetapkan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Tahun 2021-2026. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Sidayu Tahun

2021-2026 adalah : ***“Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima”***.

Agar pencapaian tujuan tersebut diatas terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu ***“Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan”*** dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama. Adapun Tujuan, Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama serta Target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Tahun 2025
(Matriks Renstra 2021-2026)

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	98,87

2.1.2. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Visi dari Kabupaten Gresik untuk Periode Renstra 2025-2029 adalah ***“Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”***. Berlandaskan visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2025 - 2029 yang dipakai Kecamatan adalah misi pertama dan misi ketiga sebagai berikut :

1. **Memperkuat Insan Gresik yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berakhlakuk Karimah**

2. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Gresik sesuai RPJMD 2025-2029 dan berdasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, ditetapkan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Tahun 2025-2029. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Sidayu Tahun 2025-2029 adalah : ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”***.

Agar pencapaian tujuan tersebut diatas terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama. Adapun Tujuan, Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama serta Target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Tahun 2025
(Matriks Renstra 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	98,87
2.	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1

		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1

Untuk menunjang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Kecamatan Sidayu mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, dokumen Rencana Kerja Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Tahun 2025
(Renstra Kecamatan Sidayu Tahun 2021-2026)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan Sidayu	Nilai	98,87

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja PAPBD Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Tahun 2025
(Renstra Kecamatan Sidayu Tahun 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	98,87
2.	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1

		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1

2.3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sidayu, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Kecamatan Sidayu Tahun 2025, sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sidayu
Kabupaten Gresik Tahun 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2025 (Rp)	PAPBD 2025 (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	4.814.296.619,51	3.567.389.524,49	- 1.246.907.095,02
2.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3.195.300,00	3.195.300,00	0,00
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	170.849.400,00	211.003.500,00	40.154.100,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	83.478.826,00	106.904.600,00	23.425.774,00
5.	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	68.537.500,00	100.077.500,00	31.540.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

-  **Capaian Kinerja**
 -  **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**
 -  **Realisasi Anggaran**
- 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) APBD 2025 dan PAPBD Tahun 2025. Tujuan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Sidayu Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Tahun 2021-2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidayu Tahun 2025. Dan juga dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Tahun 2025-2029 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja PAPBD Kecamatan Sidayu Tahun 2025.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 tersebut dengan mengukur tingkat pencapaian kinerja terhadap target perjanjian kinerja APBD dan PAPBD 2025 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, baik yang bersumber dari APBD murni maupun Perubahan APBD (PAPBD) Tahun 2025. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai sasaran strategis yang telah direncanakan serta

sebagai dasar evaluasi kinerja dan perbaikan program di tahun berikutnya. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja APBD 2025 dan PAPBD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja APBD 2025 Kecamatan Sidayu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sidayu	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	98.87	98.51	99.64	Sangat Tinggi

Tabel 3.3.
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja PAPBD 2025 Kecamatan Sidayu

Sasaran 1 : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik					
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98.87	98.51	99.64	Sangat Tinggi
Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan					
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
2.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
3.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
5.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
6.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
				99.95%	Sangat Tinggi

Capaian kinerja Tahun 2025 rata-rata 99.95% dengan kategori Sangat Tinggi. Jika dilihat dari perbandingan capaian kinerja tahun 2025, capaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, dimana tahun 2024 capaian kinerjanya mencapai 101.80% sedangkan tahun 2025 turun menjadi 99.64%, akan tetapi realisasi capaian kinerja sudah memenuhi kategori Sangat Tinggi berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.

Sedangkan untuk indikator Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan, Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan, Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan, Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan, Rasio Belanja Infrastruktur Desa dan Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa yang merupakan indikator kinerja baru sesuai Renstra 2025-2029. Adapun hasil capaian kinerja 1:1 atau 100% dari target untuk masing-masing indikator dikategorikan Sangat Tinggi berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.

3.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Sidayu telah menetapkan target kinerja yang jelas setiap tahunnya. Pada tahun 2025, kinerja Kecamatan Sidayu menunjukkan hasil yang signifikan ketika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

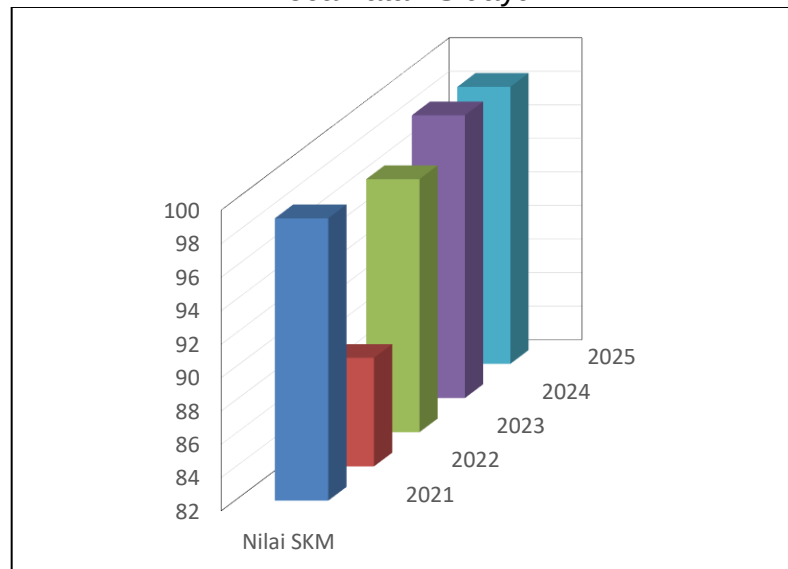
Adapun pengukuran tingkat pencapaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya sesuai periode Renstra 2021 – 2026 dan periode Renstra 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Untuk Renstra 2021-2026

Tabel 3.4.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya
Kecamatan Sidayu Periode Renstra 2021-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					KETERANGAN
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sidayu	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	98.90	88.52	97.12	98.87	98.51	Menurun

Grafik 3.1.
Perbandingan Capaian Kinerja
Kecamatan Sidayu



b. Untuk Renstra 2025-2029

Tabel 3.5.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya
Kecamatan Sidayu Periode Renstra 2025-2029

Sasaran 1 : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik				
	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	PENINGKATAN /PENURUNAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98.87	98.51	Menurun

Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan				
NO.	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	PENINGKATAN /PENURUNAN
1.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	Tetap
2.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	Tetap
3.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	Tetap
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	1:1	Tetap
5.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	Tetap
6.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1:1	1:1	Tetap

Pada tahun 2025, sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari capaian Nilai Kepuasan Masyarakat yang menurun dari 98.87 % pada tahun 2024 menjadi 98.51% pada tahun 2025, atau mengalami penurunan sebesar 0.51 poin dari target yang telah ditentukan. Akan tetapi realisasi capaian kinerja sudah memenuhi kategori Sangat Tinggi berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja. Capaian kinerja tersebut didukung adanya perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas kinerja aparatur, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di tingkat kecamatan yang selalu meningkat berkelanjutan.

Sementara itu, untuk sasaran meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan, pengukuran kinerja dilakukan melalui enam indikator rasio pendanaan, yaitu pendanaan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, belanja infrastruktur desa, dan pembiayaan penanggulangan bencana. Pada tahun 2024, seluruh prioritas sudah ada pendanaan dan pada tahun 2025 seluruh indikator tersebut telah terealisasi dengan rasio 1:1, yang

menunjukkan bahwa seluruh desa telah mengalokasikan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Capaian ini menjadi dasar penting untuk pengukuran kinerja yang lebih akurat pada tahun-tahun berikutnya serta menunjukkan bahwa kebijakan sinkronisasi perencanaan desa dengan prioritas daerah mulai berjalan secara efektif.

3.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah, Kecamatan Sidayu telah menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sidayu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Salah satu fokus utama dalam Renstra Kecamatan Sidayu baik periode Renstra 2021-2016 maupun Renstra 2025-2029 adalah

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui berbagai indikator kinerja, termasuk Nilai Kepuasan Masyarakat dan pengukuran kinerja dilakukan melalui enam indikator rasio pendanaan, yaitu pendanaan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, belanja infrastruktur desa, dan pembiayaan penanggulangan bencana.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Kecamatan Sidayu dan membandingkannya dengan target akhir yang ditetapkan dalam Renstra.

Dengan demikian, Kecamatan Sidayu dapat menilai sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Capaian kinerja yang baik tidak hanya mencerminkan efektivitas program yang dilaksanakan, tetapi juga memberikan gambaran tentang responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun pengukuran capaian kinerja dibandingkan target akhir Rencana Strategis sesuai periode Renstra 2021 – 2026 dan periode Renstra 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

a. Untuk Renstra 2021-2026

Pencapaian kemajuan capaian sasaran strategis terhadap Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Akhir
Renstra 2021-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	AKHIR 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sidayu	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	90	98.51	+

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja yang terdapat dalam Renstra tahun 2021 - 2026, telah melebihi target dengan capaian 91.36%, dikategorikan sangat baik.

b. Untuk Renstra 2025-2029

Pencapaian kemajuan capaian sasaran strategis terdapat Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.7.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Akhir
Renstra 2025-2029

Sasaran 1 : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik					
NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98.8	98.51	+

Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan					
NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	+
		Rasio Pendanaan Pemberdayaa n Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	+
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	+
		Rasio Pendanaan Pemberdayaa n Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	1:1	+
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	+
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1:1	1:1	+

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;

2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sidayu pada tahun 2025 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Sidayu yang memperoleh pelayanan sebanyak 578 responden.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sidayu pada tahun 2025 seperti dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Analisis Survey Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Sidayu Tahun 2025

1		NILAI UNSUR PELAYANAN									
2	NO. RESP										
3		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
571	568	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
572	569	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
573	570	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
574	571	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
575	572	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
576	573	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
577	574	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
578	575	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
579	576	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
580	577	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
581	578	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
582	Nilai/Unsur	2305	2296	2303	2312	2299	2297	2296	2303	2295	
583	NRR/Unsur	3.99	3.97	3.98	4	3.98	3.97	3.97	3.98	3.97	
584	NRR Tertimbang/Unsur	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	
585	JML NRR IKM TERTIMBANG	3.94									
586	JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	98.51									

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur :

1. Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan
2. Unsur 2 : Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Unsur 3 : Waktu penyelesaian pelayanan
4. Unsur 4 : Biaya / tarif pelayanan
5. Unsur 5 : Produk / spesifikasi dan jenis pelayanan
6. Unsur 6 : Kompetensi pelaksana pelayanan
7. Unsur 7 : Perilaku pelaksana pelayanan

8. Unsur 8 : Penanganan pengaduan, saran pelayanan
9. Unsur 9 : Sarana dan prasarana pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sidayu pada tahun 2025 sebesar 98.51 (sangat baik).

Selain capaian sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai wujud peningkatan tata pemerintahan yang baik, Kecamatan Sidayu juga berperan mendukung pencapaian indikator makro RPJMD Kabupaten Gresik, seperti peningkatan Harapan Lama Sekolah, kenaikan Usia Harapan Hidup, penurunan Indeks Risiko Bencana, serta peningkatan Indeks Perlindungan Anak, melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan di tingkat desa. Dukungan ini diperkuat dengan pengawalan pemanfaatan rasio pendanaan program prioritas desa, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana yang seimbang (1:1) agar pelaksanaannya tepat sasaran. Rasio ini menandakan adanya pemerataan dukungan anggaran yang proporsional dalam melaksanakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat sebesar 98,51, mendekati target Renstra Tahun 2029 sebesar 98,8, dengan tingkat kemajuan kinerja mencapai 100,29%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Selanjutnya, sasaran strategis meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan juga mencapai kinerja sangat tinggi. Seluruh indikator pendanaan pembangunan perdesaan, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana, terealisasi sesuai target dengan rasio 1:1, dengan tingkat

kemajuan kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan desa telah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

3.2.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Rata-rata Capaian Daerah Lain

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Sidayu terus berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2025, capaian kinerja Kecamatan Sidayu terkait Nilai Kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan capaian kinerja Kabupaten Gresik dan capaian kinerja indikator pendanaan pembangunan perdesaan, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana dibandingkan dengan capaian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Rata-rata Capaian Daerah Lain sesuai periode Renstra 2021 – 2026 dan periode Renstra 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

a. Untuk Renstra 2021-2026

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Rata-rata Capaian Kabupaten sesuai periode Renstra 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9.
Pengukuran Capaian Dibandingkan Dengan
Rata – Rata Capaian Daerah Lain
Periode Renstra 2021-2026

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN SIDAYU	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sidayu	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	89.85	98.51	Lebih tinggi

b. Untuk Renstra 2025-2029

Pengukuran capaian kinerja sesuai periode Renstra 2025 – 2029 untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan dengan Rata-rata Capaian Kabupaten Gresik dan capaian kinerja indikator pendanaan pembangunan perdesaan, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana dibandingkan dengan capaian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Pengukuran capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10.
Pengukuran Capaian Dibandingkan
Dengan Rata – Rata Capaian Daerah Lain
Periode Renstra 2025-2029

Sasaran 1 : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik				
NO	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN SIDAYU	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	89.85	98.51	Lebih tinggi
Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan				
NO	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN BUNGAH KAB. GRESIK	KECAMATAN SIDAYU	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
1.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	Sama
2.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	Sama
3.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	Sama
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	Sama
5.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	1:1	1:1	Sama
6.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	1:1	1:1	Sama

Kecamatan Sidayu berhasil mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat yang lebih tinggi, yaitu 98.51 dari IKM Kabupaten Gresik dengan nilai 89.85

atau lebih tinggi 8.96 (nilai). Pencapaian ini mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan selisih yang signifikan antara kedua kecamatan, Kecamatan Sidayu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator pendanaan pembangunan perdesaan, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana pencapaiannya sama dengan capaian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Faktor Penghambat Keberhasilan

Dalam mengevaluasi capaian kinerja Kecamatan Sidayu, baik periode Renstra 2021-2026 maupun periode Renstra 2025-2029, penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan serta hambatan yang dihadapi, sehingga akan bisa ditentukan Langkah-langkah solusi yang tepat agar faktor keberhasilan ada dan selalu meningkat dan faktor penghambat/kegagalan akan bisa dicegah/dikurangi/dihilangkan. Nantinya akan capaian kinerja tahun berikutnya akan lebih baik lagi. Adapun Analisa keberhasilan/kegagalan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan sesuai periode
Renstra 2021 – 2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sidayu	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	- Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik; - Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon dan email)

Tabel 3.12.
Analisis Penyebab Keberhasilan sesuai periode
Renstra 2025 – 2029

Sasaran 1 : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			
NO	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Faktor Pendukung : - Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik; - Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon dan email)	Nihil
Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			
NO	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Faktor Pendukung : Tersedianya alokasi Dana Desa serta dukungan kebijakan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan	Nihil
2.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Faktor Pendukung : Dukungan Dana Desa untuk Posyandu, Posbindu yang terintegrasi dalam Integrasi Layanan Primer	Nihil
3.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Faktor Pendukung : Komitmen pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa lewat PKK untuk perlindungan anak	Nihil
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Faktor Pendukung : Dukungan kebijakan pemerintah desa dan keterlibatan perempuan di lembaga kemasyarakatan di desa (PKK)	Nihil
5.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Faktor Pendukung : Tersedianya Dana Desa dan dukungan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa	Nihil
6.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Faktor Pendukung : Adanya kegiatan /sosialisasi tentang mitigasi risiko bencana	Nihil

Berdasarkan Tabel diatas penyebab keberhasilan Capaian Kinerja hasil analisisnya sebagai berikut

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98.51% didukung juga oleh komitmen pimpinan dan jajaran, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta pelaksanaan evaluasi kegiatan secara berkala.
- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
Capaian indikator rasio pendanaan pendidikan di perdesaan sebesar 100% didukung oleh ketersediaan regulasi dan kebijakan daerah serta dukungan pendanaan desa.
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
Capaian indikator Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan sebesar 100% didukung oleh kebijakan daerah yang mendorong peningkatan sektor kesehatan serta alokasi dana desa pada kegiatan pemberdayaan kesehatan.
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
Capaian rasio pendanaan perlindungan anak di perdesaan sebesar 100% didukung oleh regulasi daerah serta komitmen desa dalam pengalokasian anggaran perlindungan anak.
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
Capaian indikator pemberdayaan perempuan sebesar 100% didukung oleh kebijakan daerah yang mendorong kesetaraan gender serta dukungan pendanaan desa.
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
Capaian rasio belanja infrastruktur desa sebesar 100% didukung oleh dukungan pendanaan desa dan kebijakan pembangunan daerah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa
Capaian indikator pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa sebesar 100% didukung oleh kebijakan daerah di bidang kebencanaan serta meningkatnya kesadaran desa terhadap kesiapsiagaan bencana.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Sidayu mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.988.570.424,49. Anggaran tersebut atas dijabarkan ke dalam 5 Program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini.

3.3.1. Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

Anggaran Tahun 2025 untuk periode Renstra 2021-2026 dialokasikan 100% seluruhnya untuk mendukung sasaran kinerja meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Kecamatan Sidayu.

Tabel 3.13.
Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan
Periode Renstra 2021 -2026

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sidayu				
INDIKATOR KINERJA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD 2025	REALISASI PAPBD 2025	CAPAIAN
Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	100%	3,988,570,424.49	3,376,445,797.61	84.65%

Untuk periode Renstra 2021-2026, Capaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar 84,65% dengan kategori Tinggi. Hal ini didukung dengan pelaksanaan pelayanan sesuai SOP dan layanan pengaduan yang selalu direspon oleh Kecamatan Sidayu.

Sedangkan anggaran Tahun 2025 untuk periode Renstra 2025-2029 dialokasikan sesuai indikator kinerja masing-masing yaitu 7 (tujuh) Indiator Kinerja Utama.

Tabel 3.14.
Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan
Periode Renstra 2025 -2029

Sasaran 1 : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik					
NO	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD 2025	REALISASI PAPBD 2025	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.52%	3,570,584,824.49	2,993,167,297.61	83.83%
Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan					
NO	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD 2025	REALISASI PAPBD 2025	CAPAIAN
1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1.41%	56,310,225.00	51,256,200.00	91.02%
2	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1.41%	56,310,225.00	51,256,200.00	91.02%
3	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1.41%	56,310,225.00	51,256,200.00	91.02%
4	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1.41%	56,310,225.00	51,256,200.00	91.02%
5	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	2.15%	85,84,100.00	83,040,100.00	96.74%
6	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	2.68%	106,904,600.00	95,213,600.00	89.62%
			3,988,570,424.49	3,376,445,797.61	90.53%

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 2 (dua) IKU dengan kategori Tinggi dan 5 (lima) IKU dengan kategori Sangat Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 sesuai alokasi anggaran adalah sebesar 90.53% dengan kategori Tinggi.

3.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran penghitungannya memakai rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dari rumus diatas dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Periode Renstra 2021 -2026

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sidayu	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	99.64%	84.65%	15.04

Tabel 3.16.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Periode Renstra 2025 -2029

Sasaran 1 : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik				
NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.64%	83.83%	15.87
Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan				
NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
1.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	100%	91.02%	8.98

2.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	100%	91.02%	8.98
3.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	100%	91.02%	8.98
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	100%	91.02%	8.98
5.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	100%	96.74%	3.26
6.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	100%	89.62%	10.94
		99.95%	90.53%	9.42

Dari tabel 3.15. untuk efektifitas penggunaan sumber daya periode Renstra 2021-2026 diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Sidayu pada tahun 2025 capaian kinerjanya menunjukkan hasil sebesar 99.64% dengan kategori **“SANGAT TINGGI”** dan capaian anggaran sebesar 84.65% dengan kategori **“TINGGI”** dan efisiensi sebesar 15.04. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 bahwa batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%, sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Sidayu pada tahun 2025 untuk periode Resntra 2021-2026 telah efisien dalam penggunaan anggaran.

Dari tabel 3.16. untuk efektifitas penggunaan sumber daya periode Renstra 2025-2029 diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Sidayu pada tahun 2025 rata-rata capaian kinerjanya menunjukkan hasil sebesar 99.95 % dengan kategori **“SANGAT TINGGI”** dan rata-rata capaian anggaran sebesar 90.53% dengan kategori **“TINGGI”** dan rata-rata efisiensi sebesar 9.42. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 bahwa batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%, sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Sidayu pada tahun 2025 untuk periode Resntra 2025-2029 telah efisien dalam penggunaan anggaran.

3.3.3. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Sidayu diukur melalui serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU tersebut didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dijalankan. Menganalisis efektivitas program dan kegiatan ini krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor penunjang keberhasilan dan juga hambatan yang menyebabkan kegagalan, sehingga strategi perbaikan dapat dirumuskan. Data capaian kinerja menunjukkan adanya variasi dalam tingkat keberhasilan setiap program.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan keselarasan pembangunan prioritas daerah hingga tingkat desa/kelurahan.

Dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta optimalisasi penyebaran informasi pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui perbaikan sarana prasarana pelayanan, kejelasan mekanisme dan prosedur, serta peningkatan akses informasi pelayanan.

Sementara itu, dalam mendukung keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan, program dan kegiatan diarahkan pada pembinaan dan pendampingan aparatur desa, fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa, serta penguatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan. Kegiatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan rasio pendanaan desa pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, pembangunan infrastruktur, serta penanggulangan bencana.

Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program melalui

penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian kinerja dapat lebih optimal.

Adapun Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Kecamatan Sidayu dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.17.
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja
Kecamatan Sidayu Periode Renstra 2021 -2026

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sidayu	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA
		7.01.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		7.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		7.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		7.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7.01.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

		7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
		7.01.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Sidayu Tahun 2025 pada periode Renstra 2021-2026 didukung secara keseluruhan oleh 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan.

Sedangkan keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Sidayu Tahun 2025 pada periode Renstra 2025-2029 program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sesuai dengan output masing-masing kegiatan.

Program penunjang pencapaian kinerjanya dapat dilihat pada table berikut ini .

Tabel 3.18.
Analisa Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja
Kecamatan Sidayu Periode Renstra 2025 -2029

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG
1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai IKM	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA
		7.01.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		7.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		7.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		7.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7.01.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

		7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
		7.01.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
		7.01.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
		7.01.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
		7.01.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Berdasarkan Tabel diatas penyebab keberhasilan Capaian Kinerja Kecamatan Sidayu hasil analisisnya sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur melalui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang berfokus

pada penguatan perencanaan, penganggaran, administrasi, serta penyediaan jasa penunjang pelayanan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan, yang berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat.

2. Sasaran Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Sasaran meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan diukur melalui indikator rasio pendanaan dan pembiayaan desa pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana. Pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program dan kegiatan tersebut mendukung penyelarasan perencanaan dan penganggaran desa dengan prioritas pembangunan daerah melalui pembinaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian Kinerja Kecamatan Sidayu Tahun 2025 untuk sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yaitu : “ Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tingkat Kecamatan “ dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan sebesar 99,64% dan capaian keuangan sebesar 84,65% dengan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,87. Sedangkan pencapaian kinerja Kecamatan Sidayu Tahun 2025 untuk sasaran Renstra 2025-2029 Kecamatan Sidayu dengan 2 (dua) Sasaran yaitu : “Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik“ dan “Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan“ dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama mencapai rata-rata 99,95% dan rata-rata capaian keuangan sebesar 90,53% dengan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,42.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 2021-2026 maupun Rencana Strategis 2025-2029 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat

keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.988.570.424,49 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.3.376.445.797,61.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Adapun rekomendasi langkah – langkah perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi serta membuat kebijakan yang efektif.
2. Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
3. Melakukan usulan tentang pemberian Reward dan punishment terkait Capaian Kinerja sehingga dapat memotivasi untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN

-  **Perjanjian Kinerja APBD 2025**
 -  **Perjanjian Kinerja PAPBD 2025**
 -  **Matriks Renstra 2021–2026**
 -  **Matriks Renstra 2025–2029**
 -  **Monev Renja 2025**
 -  **Dokumentasi Kegiatan**
- 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWARTONO, AP., M.Si

Jabatan : CAMAT SIDAYU

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDIAKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
CAMAT SIDAYU

SUWARTONO, AP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721116 199311 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT SIDAYU KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	98.87 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,814,296,619.51	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 3,195,300.00	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 170,849,400.00	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 83,478,826.00	APBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 68,537,500.00	APBD
Jumlah			Rp. 5,140,357,645.51	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
CAMAT SIDAYU

SUWARTONO AP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721116 199311 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWARTONO, AP., M.Si

Jabatan : CAMAT SIDAYU

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
CAMAT SIDAYU


SUWARTONO, AP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721116 199311 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT SIDAYU KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan di tingkat desa/kelurahan	1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1 Rasio
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan di tingkat desa/kelurahan	1	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1 Rasio
3	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan	1	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1 Rasio
4	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan	1	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1 Rasio
5	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur di tingkat desa/kelurahan	1	Rasio belanja infrastruktur desa	1 Rasio
6	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana di tingkat desa/kelurahan	1	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1 Rasio
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,87 Nilai

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3,567,389,524.49	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 3,195,300.00	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 211,003,500.00	PAPBD

4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 106,904,600.00	PAPBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 100,077,500.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 3,988,570,424.49	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
CAMAT SIDAYU

SUWARTONO, AP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19721116 199311 1 002



Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sidayu
Kabupaten Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100%	2,784,467,000	100%	3,053,263,000	100%	3,577,764,000	100%	4,211,932,000	100%	4,929,218,000	100%	18,556,644,000	Sekretariat	Kec. Sidayu
		7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi		13 Dok/ Lap	35,000,000	13 Dok/ Lap	35,000,000	13 Dok/ Lap	35,000,000	13 Dok/ Lap	49,000,000	13 Dok/ Lap	60,602,500		214,602,500		
		7	01	01	2	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 buku	5,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	7,000,000	2 Dok.	12,000,000		34,000,000		
		7	01	01	2	01	2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		10 buku	5,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	7,000,000	1 Dok.	7,320,500		29,320,500		
		7	01	01	2	01	3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		10 buku	5,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	7,000,000	1 Dok.	7,320,500		29,320,500		
		7	01	01	2	01	4	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		17 buku	5,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	7,000,000	1 Dok.	7,320,500		29,320,500		
		7	01	01	2	01	5	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		13 buku	5,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	7,000,000	1 Dok.	7,320,500		29,320,500		

		7	01	01	2	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Lap.	5,000,000	12 Lap.	5,000,000	12 Lap.	5,000,000	12 Lap.	7,000,000	12 Lap.	12,000,000	34,000,000			
		7	01	01	2	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 lap.	5,000,000	2 lap.	5,000,000	2 lap.	5,000,000	2 lap.	7,000,000	2 lap.	7,320,500	29,320,500			
		7	01	01	2	02																		
		7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 bulan	2,370,867,000	12 bulan	2,639,663,000	12 bulan	3,164,164,000	12 bulan	3,635,867,000	12 bulan	3,920,977,315	15,731,538,315			
		7	01	01	2	02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24 orang	2,362,867,000	24 orang/Bulan	2,631,663,000	24 orang/Bulan	3,154,484,000	24 orang/Bulan	3,625,219,000	24 orang/Bulan	3,909,264,515	15,683,497,515			
		7	01	01	2	02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 buku	5,000,000	1 Lap.	5,000,000	1 Lap.	6,050,000	1 Lap.	6,655,000	1 Lap.	7,320,500	30,025,500			
		7	01	01	2	01	7	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		3 Lap.	3,000,000	18 Lap.	3,000,000	18 Lap.	3,630,000	18 Lap.	3,993,000	18 Lap.	4,392,300	18,015,300			
		7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan		31 orang	7,000,000	31 orang	7,000,000	31 orang	7,000,000	31 orang	8,500,000	31 orang	11,785,500	41,285,500			
		7	01	01	2	05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		31 Orang	7,000,000	31 Orang	7,000,000	31 Orang	7,000,000	31 Orang	8,500,000	31 Orang	11,785,500	41,285,500			
		7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah		12 bulan	55,800,000	12 bulan	55,800,000	12 bulan	55,800,000	12 bulan	67,800,000	12 bulan	149,923,805	385,123,805			

[illegible]

		7	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah		12 bulan	200,800,000	12 bulan	200,800,000	12 bulan	200,800,000	12 bulan	200,800,000	12 bulan	332,057,880	1,135,257,880		
								- Presentase petugas layanan yang memahami bahasa isyarat					100%		100%		100%					
		7	01	01	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	40,000,000	12 lap.	40,000,000	12 lap.	40,000,000	12 lap.	45,000,000	12 lap.	96,630,600	261,630,600		
		7	01	01	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	160,800,000	12 lap.	160,800,000	12 lap.	188,400,000	12 lap.	188,400,000	12 lap.	237,727,280	936,127,280		
		7	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur		12 bulan	55,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	139,965,000	12 bulan	263,538,000	568,503,000		
								- Ketersediaan parkir kendaraan penyandang disabilitas					1 unit		1 unit		1 unit					
		7	01	01	2	09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	15,000,000	6 Unit	15,000,000	6 Unit	15,000,000	6 Unit	20,000,000	6 Unit	51,243,500	116,243,500		
		7	01	01	2	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	30,000,000	3 unit	30,000,000	3 unit	30,000,000	3 unit	100,000,000	3 unit	190,333,000	380,333,000		
		7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	10,000,000	20 unit	10,000,000	20 unit	10,000,000	20 unit	19,965,000	20 unit	21,961,500	71,926,500		
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100%	10,088,000	100%	10,550,000	100%	11,242,000	100%	12,034,000	100%	12,806,000	56,720,000		

		7	01	02	2	02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		82	10,088,000	84	10,550,000	86	11,242,000	88	12,034,000	90	12,806,000		56,720,000		
		7	01	02	2	02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	147 peserta	10,088,000	1 Lap.	10,550,000	1 Lap.	11,242,000	1 Lap.	12,034,000	1 Lap.	12,806,000		56,720,000		
		7	01	03																			
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		100%		100%		100%		100%		100%			Pembangunan		
								Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi		100%		100%		100%		100%		100%					
								Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi		37%	286,065,000	60%	271,266,000	83%	349,166,000	93%	347,646,000	100%	446,520,000		1,700,663,000		
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		70%		75%		85%		95%		100%					
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina		57%		65%		85%		93%		100%					
		7	01	03	2	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa		28 Keg	126,000,000	28 Keg	126,000,000	28 Keg		28 Keg		28 Keg		723,000,000			
								- Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan						100%		100%		100%					
								- Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa						100%		100%		100%					

		7	01	03	2	01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		100 orang	40,000,000	7 lembaga Kemasya rakatan	40,000,000	7 lembaga Kemasya rakatan	50,000,000	7 lembaga Kemasya rakatan	50,000,000	7 lembaga Kemasya rakatan	65,000,000	245,000,000		
		7	01	03	2	01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		21 buku	15,000,000	21 Dok.	15,000,000	21 Dok.	15,000,000	21 Dok.	15,000,000	21 Dok.	20,000,000	80,000,000		
		7	01	03	2	01	3	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		25 keg.	71,000,000	23 Lap.	71,000,000	23 Lap.	81,000,000	23 Lap.	85,000,000	23 Lap.	90,000,000	398,000,000		
		7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina		100%	160,065,000	100%	145,266,000	100%	203,166,000	100%	197,646,000	100%	271,520,000	977,663,000	Kesra	
							- Persentase jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak						76%	81%	86%								
							- Jumlah desa yang memiliki RBRA					71%	76%	81%									
							- Jumlah desa yang memiliki Pusat Kreatifitas anak					71%	76%	81%									
							- Jumlah desa yang memiliki Rumah Curhat aktif					76%	81%	86%									
							- Jumlah desa yang memiliki regulasi stop perkawinan anak					81%	86%	90%									
							- Jumlah desa yang memiliki regulasi terkait pencegahan anak putus sekolah					81%	86%	90%									
		7	01	03	2	03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5 lembaga	160,065,000	5 lembaga	145,266,000	5 lembaga	203,166,000	5 lembaga	197,646,000	5 lembaga	271,520,000	977,663,000		

		7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100%	81,875,000	100%	89,806,000	100%	105,262,000	100%	123,951,000	100%	145,092,000		545,986,000	Trantib	
		7	01	04	2	01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.		12 bulan	66,875,000	12 bulan	72,806,000	12 bulan	82,617,600	12 bulan	94,581,154	12 bulan	112,785,169		429,664,923		
		7	01	04	2	01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		25 org	56,875,000	12 Lap.	60,806,000	12 Lap.	65,000,000	12 Lap.	75,201,794	12 Lap.	91,467,873		349,350,667		
		7	01	04	2	01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		28 org	10,000,000	4 Lap.	12,000,000	4 Lap.	17,617,600	4 Lap.	19,379,360	4 Lap.	21,317,296		80,314,256		
		7	01	04	2	02		Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Prosentase pelanggaran yang tertangani		100%	15,000,000	100%	17,000,000	100%	22,644,400	100%	29,369,846	100%	32,306,831		116,321,077		
		7	01	04	2	02	1	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		4 kali	15,000,000	8 Lap.	17,000,000	8 Lap.	22,644,400	8 Lap.	29,369,846	8 Lap.	32,306,831		116,321,077		
		7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		100%	2,683,000	100%	2,675,000	100%	2,851,000	100%	3,052,000	100%	3,247,000		14,508,000	Trantib	
		7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kewenangan/penugasan yang di limpahkan		1 keg	2,683,000	1 keg	2,675,000	1 keg	2,851,000	1 keg	3,052,000	1 keg	3,247,000		14,508,000		

		7	01	05	2	01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		96 peserta	2,683,000	96 Orang	2,675,000	96 Orang	2,851,000	96 Orang	3,052,000	96 Orang	3,247,000	14,508,000		
		7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		100%	82,858,000	100%	74,659,000	100%	87,987,000	100%	89,606,000	100%	85,894,000	421,004,000	Pemerintahan	
		7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan		21 desa	82,858,000	21 desa	74,659,000	21 desa	87,987,000	21 desa	89,606,000	21 desa	85,894,000	421,004,000		
		7	01	06	2	01	1	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		21 buku	15,864,000	21 Dok.	12,000,000	21 Dok.	15,000,000	21 Dok.	17,000,000	21 Dok.	18,000,000	77,864,000		
		7	01	06	2	01	2	Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		21 Desa	10,000,000	21 Dok.	10,000,000	21 Dok.	10,000,000	21 Dok.	12,990,000	21 Dok.	12,990,000	55,980,000		
		7	01	06	2	01	3	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		21 Desa	15,000,000	21 Dok.	15,000,000	21 Dok.	15,172,000	21 Dok.	17,000,000	21 Dok.	20,040,000	82,212,000		
		7	01	06	2	01	5	Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		126 orang	26,838,000	6 Dok.	32,659,000	6 Dok.	32,659,000	6 Dok.	32,616,000	6 Dok.	34,864,000	159,636,000		
		7	01	06	2	01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		4 kali	15,156,000		4 Dok.	15,156,000						30,312,000		

Matriks Rencana Strategis 2025-2029
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kecamatan				4,994,978,956		5,143,117,993.00		5,331,979,990.00		5,599,096,644.00		5,770,030,029.00	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	100%	4,838,971,834	100%	4,982,484,064.00	100%	5,165,447,360.00	100%	5,424,221,216.00	100%	5,589,815,870.00	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan , penganggaran dan Evaluasi	16 Dok/ Lap	16 Dok/ Lap	10,000,000	16 Dok/ Lap	11,250,000	16 Dok/ Lap	12,500,000	16 Dok/ Lap	13,750,000	16 Dok/ Lap	15,000,000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 buku	1 buku	2,000,000	1 buku	2,250,000	1 buku	2,500,000.00	1 buku	2,750,000	1 buku	3,000,000	
			Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 buku	1 buku	2,000,000	1 buku	2,250,000	1 buku	2,500,000.00	1 buku	2,750,000	1 buku	3,000,000	
			Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 buku	1 buku	2,000,000	1 buku	2,250,000	1 buku	2,500,000.00	1 buku	2,750,000	1 buku	3,000,000	
			Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 buku	1 buku	2,000,000	1 buku	2,250,000	1 buku	2,500,000.00	1 buku	2,750,000	1 buku	3,000,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 lapoan	12 lapoan	2,000,000	12 lapoan	2,250,000	12 lapoan	2,500,000.00	12 lapoan	2,750,000	12 lapoan	3,000,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	4,280,216,502	12 bulan	4,323,248,316.44	12 bulan	4,409,917,846.00	12 bulan	4,498,316,244.60	12 bulan	4,588,477,453.87	
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang	24 orang	4,278,216,502	25 orang	4,320,998,316.44	25 orang	4,407,417,846.00	25 orang	4,495,566,244.60	25 orang	4,585,477,453.87	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 buku	1 buku	2,000,000	1 buku	2,250,000	1 buku	2,500,000.00	1 buku	2,750,000	1 buku	3,000,000	

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	25 orang	25 orang	5,950,000	25 orang	6,118,700	25 orang	6,335,300	25 orang	6,637,682	25 orang	16,834,300	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	25 orang	5,950,000	25 orang	6,118,700	25 orang	6,335,300	25 orang	6,637,682.25	25 orang	16,834,300	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	126,790,000	12 bulan	152,936,300	12 bulan	222,974,500	12 bulan	283,654,200	12 bulan	294,750,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,150,000	1 Paket	5,299,399.74	1 Paket	5,487,100	1 Paket	5,748,900	1 Paket	6,000,000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	22,730,000	6 Paket	23,388,500	8 Paket	88,892,500	8 Paket	93,193,300	8 Paket	97,500,000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	3,370,000	2 Paket	3,467,500	19 Paket	3,590,500	19 Paket	3,761,800	19 Paket	3,875,000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	5,980,000	3 Paket	6,155,900.00	4 Paket	6,373,900	4 Paket	6,677,900	4 Paket	6,875,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	6 dokumen	1,860,000	12 Dok.	1,900,000.00	12 Dok.	2,000,000	12 Dok.	2,075,000	12 Dok.	2,500,000	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						-		-		-		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	62,400,000	12 lap.	64,300,000.00	12 lap.	66,490,000	12 lap.	69,665,000	12 lap.	72,000,000	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	25,300,000	1	48,425,000.00	1	50,140,500	1	102,532,300	1	106,000,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	343,965,332	12 bulan	356,025,647.82	12 bulan	371,107,214	12 bulan	415,329,389.15	12 bulan	427,064,116	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap.	12 lap.	46,308,832	12 lap.	49,795,647.82	12 lap.	54,030,214	12 lap.	83,126,389.15	12 lap.	82,064,116.13	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap.	12 lap.	297,656,500	12 lap.	306,230,000.00	12 lap.	317,077,000	12 lap.	332,203,000.00	12 lap.	345,000,000.00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas terhadap sarana prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	72,050,000	12 bulan	132,905,100	12 bulan	142,612,500	12 bulan	206,533,700	12 bulan	247,690,000	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	36,000,000	5 unit	43,816,300	5 unit	45,368,000	5 unit	47,532,700	5 unit	68,940,000	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	31,300,000	3 unit	84,259,800	3 unit	87,244,500	3 unit	148,524,000	3 unit	152,950,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	20 unit	4,750,000	20 unit	4,829,000	20 unit	10,000,000	20 unit	10,477,000	20 unit	25,800,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	3,211,677	100%	3,306,927	100%	3,428,362	100%	3,600,113	100%	3,710,020	
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	98.87	98.25	3,211,677	98.50	3,306,927	98.75	3,428,362	98.8	3,600,113	99	3,710,020	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	1 Lap.	3,211,677	1 Lap.	3,306,927	1 Lap.	3,428,362	1 Lap.	3,600,113	1 Lap.	3,710,020	
4. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah	1. Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio) 2. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio) 3. Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio) 4. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio) 5. Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio) 6. Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100%	100%		100%		100%		100%		100%			

				Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	28 Keg	28 Keg	90,806,000	28 Keg	93,568,150	28 Keg	96,882,450	28 Keg	101,504,400	28 Keg	104,685,500
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga Kemasyarakatan	7 lembaga Kemasyarakatan	56,510,900	7 lembaga Kemasyarakatan	58,138,600	7 lembaga Kemasyarakatan	60,197,900.00	7 lembaga Kemasyarakatan	63,069,800	7 lembaga Kemasyarakatan	65,112,300
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21 dokumen	21 dokumen	15,795,100	21 Dok.	16,250,000	21 Dok.	16,825,650.00	21 Dok.	17,628,300	21 Dok.	18,150,600
			Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	3 laporan	3 laporan	18,500,000	23 Lap.	19,179,550	23 Lap.	19,858,900	23 Lap.	20,806,300	23 Lap.	21,422,600
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	80,919,044	100%	83,249,857	100%	86,428,560	100%	90,989,956	100%	93,685,471
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga	5 lembaga	80,919,044	5 lembaga	83,249,857	5 lembaga	86,428,560	5 lembaga	90,989,956	5 lembaga	93,685,471
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	83,906,675	100%	86,395,151	100%	89,567,701	100%	94,054,781	100%	96,926,157
			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.	12 bulan	12 bulan	68,443,000	12 bulan	70,513,900	12 bulan	72,928,875	12 bulan	76,621,450	12 bulan	78,977,300

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi vertikal di wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	49,093,000	12 Lap.	50,507,600	12 Lap.	52,917,275	12 Lap.	55,441,000	12 Lap.	57,084,300	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	4 laporan	19,350,000	4 Lap.	20,006,300	4 Lap.	20,011,600.00	4 Lap.	21,180,450.00	4 Lap.	21,893,000	
			Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran yang tertangani	100%	100%	15,463,675	100%	15,881,251	100%	16,638,826	100%	17,433,331	100%	17,948,857	
			Koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 Lap.	8 Lap.	15,463,675	8 Lap.	15,881,251	8 Lap.	16,638,826	8 Lap.	17,433,331	8 Lap.	17,948,857	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	68,888,770	100%	70,931,851	100%	73,536,567	100%	77,220,534	100%	79,577,982	
				Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	21 desa	21 desa	68,888,770	21 desa	70,931,851	21 desa	73,536,567	21 desa	77,220,534	21 desa	79,577,982	
			Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 dokumen	21 dokumen	4,342,000	21 dokumen	4,467,000	21 dokumen	4,625,300	21 dokumen	5,021,700	21 dokumen	5,170,500	
			Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 dokumen	21 dokumen	24,012,000	21 dokumen	23,890,500	21 dokumen	24,736,600	21 dokumen	25,916,800	21 dokumen	26,684,600	
			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 dokumen	21 dokumen	3,075,000	21 dokumen	3,060,000	21 dokumen	8,390,000	21 dokumen	8,790,300	21 dokumen	9,051,000	
			Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	21 dokumen	21 dokumen	34,383,300	21 dokumen	31,484,700	21 dokumen	32,599,900	21 dokumen	34,155,000	21 dokumen	35,168,000	

			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					4,953,900.00						
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	21 dokumen		3,076,470	21 dokumen	3,075,751	21 dokumen	3,184,767	21 dokumen	3,336,734	21 dokumen	3,503,882

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Gresik
Renja Perangkat Daerah OPD Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD (Perubahan) :

1. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan

No.	KODE	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)				Unit SKPD Penanggungjawab	KET.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=10+11+12+13		15=14/9x100		16=8+14		17=16/7 x 100		18	19						
			URUSAN KEWILAYAHAN																																
			KECAMATAN SIDAYU			100	25,031,213,059	92,32	3,651,359,115	100	3,988,570,424,49	20,35	811,513,374.12	17,77	708,800,411.84	21,27	848,280,935,65	25,27	1,007,851,076,00	84,65	3,376,445,797,61	84,65	84,65	177	7,027,804,912,71	177	28,08								
	7.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	21,773,669,143	15	3,160,482,636	100	3,567,389,524,49	21,47	766,086,774.12	19,11	681,994,911.84	21,34	761,433,435,65	21,88	780,546,876,00	83,81	2,989,971,997,61	83,81	83,81	98	6,150,454,634	98	28,25								
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	214,602,500	6	12,479,195	100	6,749,000	-	-	8.89	599,800	44,90	3,030,400	46,21	3,118,800	100,00	6,749,000	100,00	100,00	106	19,228,195	106	8,96	Subbag UP							
	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku rencana kerja SKPD (2021-2022)	buku	3	5,000,000	-	-				-	-			316,700	1	1,033,100	1	1,349,800	100,00	100,00	2	3,509,639	40	12,10								
				Jumlah buku rencana kerja SKPD (2023-2026)	dokumen	5	29,000,000	1,00	2,159,839	1	1,349,800									1	1,349,800	100,00	100,00	2	3,509,639	40	12,10								
	7.01.01.2.01.0002		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA (2021-2022)	buku	10	5,000,000																0	-	0,00	-									
				Jumlah Dokumen RKA (2023-2026)	dokumen	4	24,320,500	1,00	2,999,839	1	1,349,800						918,000	1	431,800	1	1,349,800	100,00	100,00	2	4,349,639	50	17,88								
	7.01.01.2.01.0003		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD (2021-2022)	buku	10	5,000,000																0	-	0,00	-									
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD (2023-2026)	dokumen	4	24,320,500	-	-											-	-		0	-	-	0,00									
	7.01.01.2.01.0004		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD (2021-2022)	buku	17	5,000,000																0	-	0,00	-									
				Jumlah Dokumen DPA SKPD (2023-2024)	dokumen	4	24,320,500	1,00	2,999,839	1	1,349,800				599,800			1	750,000	1	1,349,800	100,00	100,00	2	4,349,639	50	17,88								
	7.01.01.2.01.0005		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD (2021-2022)	buku	13	5,000,000																0	-	0,00	-									
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD (2023-2026)	dokumen	4	24,320,500	1,00	2,159,839	1	1,349,800					750,000		599,800	-	1,349,800	-	100,00	1	3,509,639	25	14,43									
	7.01.01.2.01.0006		Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah tembusnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi (2021-2022)	laporan	10	5,000,000	-	-											-	-		0	-	0,00	-									
				Jumlah tembusnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi (2023-2026)	laporan	48	29,000,000	6	2,159,839	12	1,349,800	3		3		3	1,045,700	3	304,100	12	1,349,800	100,00	100,00	18	3,509,639	38	12,10								
	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang Dievaluasi (2021-2022)	laporan	2	5,000,000																0	-	0,00	-									
				Jumlah Laporan Kinerja yang Dievaluasi (2022-2023)	laporan	8	24,320,500																0	-	-	0,00									
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		bulan	12	18,358,353,036	12	2,604,903,191	12	3,073,395,355,71	3	684,811,546.12	3	604,528,963.84		664,593,151		601,348,459,00	6	2,555,282,119,61	50,00	83,14	18	5,160,185,311	150	28,11	Subbag UP							
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan (2021-2022)	orang	24	4,989,681,721																0	-	0,00	-									
				Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan (2023-2026)	orang/bulan	24	13,320,630,515	24	2,602,743,352,10	25	3,072,045,555,71	25	684,811,546.12	25	604,528,963.84		664,593,151		599,998,659,00	25	2,553,932,319,61	100,00	83,13	49	5,156,675,672	204	38,71								

7.01.01.2.02.0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun (2021-2022)	buku	1	5,000,000	-	-										-	-			0	-	0.00	-				
		Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun (2023-2026)	laporan	4	25,025,500	1.00	2,159,839	1	1,349,800				1	1,349,800	1	1,349,800	100.00	100.00	2	3,509,639	50	14.02						
	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD (2021-2022)	laporan	3	3,000,000														0	-	0.00	-						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD (2023-2026)	laporan	72	15,015,300	-	-	0	0	-	-				-	-			0	-	-	0.00						
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	orang	156	53,071,000	66	65,177,680	25	26,617,000	0	-	0	2,958,500	25	14,858,500	25	17,817,000.00	100.00	86.42	91	82,994,680	58	156.38	Subbag UP				
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (2021-2022)	orang	32	18,785,500	31	55,956,900												31	55,956,900	96.88	297.87						
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (2022-2023)	orang	124	34,285,500	35	9,220,780	25	20,617,000	-	-		2,958,500	25	14,858,500	25	17,817,000	100.00	86.42	60	27,037,780	48	78.86					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	bulan	12	748,176,802	12	93,088,838	12	82,995,900	-	-	17.29	14,349,900	9.61	7,977,600	50.99	42,321,700	77.89	64,649,200	649.12	77.89	90	157,738,038	749	21.08	Subbag UP		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja Komponen Listrik (2021-2022)	buah	54	3,000,000														0	-	0.00	-						
		Jumlah belanja Komponen Listrik (2023-2026)	paket	4	32,961,500	1	10,258,858	1	5,124,900		1.00	1,306,100		1	3,818,800	1	5,124,900	100.00	100.00	2	15,383,758	50	46.67					
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terdida (2021-2022)	jenis	108	112,381,421														0	-	0.00	-						
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terdida (2022-2023)	paket	32	108,564,000	8	44,560,218	6	28,464,200		2.00	4,955,000	2.00	5,765,400	2	17,743,800.00	6	28,464,200	100.00	100.00	14	73,024,418	44	67.26				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan kantor yg disediakan makan dan minum (2021-2022)	kegiatan	36	24,219,000	-	-				-						-	-	0	-	0.00	-						
		Jumlah kegiatan kantor yg disediakan makan dan minum (2023-2026)	paket	76	55,818,038	19	4,380,400	2	3,353,500		1	825,500	1,639,000	1	889,000	2	3,353,500	100.00	100.00	21	7,733,900	28	13.86					
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (2021-2022)	jenis	4	16,380,976	-	-				-						-	-	0	-	0.00	-						
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan (2023-2026)	paket	16	52,519,287	4	7,496,900	3	4,121,400		1	1,002,000	390,000	2	2,729,400	3	4,121,400	100.00	100.00	7	11,618,300	44	22.12					
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (2021-2022)	jenis	2	3,600,000														0	-	0.00	-						
		Jumlah bahan bacaan (2023-2026)	dokumen	48	8,035,380	12	1,458,000	5	916,000			1	183,200	4	732,800	5	916,000	100.00	100.00	17	2,374,000	35	29.54					
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Materi/Buku cek (2021-2022)	lembar	300	32,784,600														0	-	0.00	-						
		Jumlah Materi/Buku cek (2023-2026)	paket	4	26,784,600	607	6,070,000	1	2,989,000		1	756,400			2,232,600	1	2,989,000	100.00	100.00	608	9,059,000	15,200	33.82					
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi	Jumlah pelaksanaan rapat koord. & konsultasi (2021-2022)	bulan	24	39,000,000														0	-	0.00	-						

			Jumlah pelaksanaan rapat koord. & konsultasi (2023-2026)	Laporan	48	44,641,000	12	10,320,000	12	13,031,700		3.00	3,500,000		9.00	9,500,000	12	13,000,000	100.00	99.76	24	23,320,000	50	52.24		
7.01.01.2.08.001.1.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem PHI pada SKPD (2024-2026)	dokumen	5	187,487,000	1	8,544,462	1	24,995,200		1.00	2,004,900		4,675,300	1	6,680,200	100.00	26.73								
7.01.01.27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Kecamatan Sidayu	jenis	30	287,846,000	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	13	-	Sisbag UP				
7.01.01.27.5	Pengadaan Mebel	Jumlah belanja pengadaan mebel kantor (2021 - 2022)	jenis	1	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	-					
		Jumlah belanja pengadaan mebel kantor (2023 - 2024)	unit	4	197,846,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0.00					
7.01.01.27.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (2021-2022)	jenis	5	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	-					
		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (2023-2026)	unit	5	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0.00					
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		bulan	72	1,427,057,323	100	316,260,366	100	334,122,701	24.32	81,275,328	16.14	53,920,648	24.40	81,533,785	24.29	81,174,449	89.16	297,904,110	89.16	89.16	189	614,164,476	263	43.84	Sisbag UP
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah jasa operasional Rek. Telp dan Listrik (2021-2022)	bulan	24	108,499,443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	-					
		Jumlah jasa operasional Rek. Telp dan Listrik (2023-2026)	bulan	48	221,630,600	12.00	30,312,906	12	37,976,200.78	3	7,617,218	3	4,553,168	3	7,351,315	3	11,596,589.00	12.00	31,118,290	100.00	81.94			0.00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa adm. Kantor (2021-2022)	bulan	24	321,600,000													0	-	0.00	-					
		Jumlah lap. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan (2023-2026)	Laporan	48	775,327,280	10	285,947,460	12	296,146,500	3	73,658,010	3	49,367,480	3	74,182,470	3	69,577,860	12	266,785,820	100.00	90.09	22	552,733,280	46	71.29	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan thd sarana prasarana aparatur	bulan	100	684,562,482	100	68,573,366	100	49,509,568	-	-	17.18	8,505,600	2.71	1,340,000	76.20	37,724,968	96.08	47,570,568	96.08	96.08	196	116,143,934	196	16.97	Sisbag UP
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin yg dilaksanakan (2021-2022)	bulan	24	49,999,950													0	-	0.00	-					
		Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin yg dilaksanakan (2023-2024)	unit	24	101,243,500	6	30,571,566	5	30,971,200		1.00	7,205,600		4.00	21,826,600.00	5	29,032,200	100.00	93.74	11	59,603,766	46	58.87			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor & bangunan lainnya (2021-2022)	unit	6	96,115,800													0	-	0.00	-					
		Jumlah pemeliharaan gedung kantor & bangunan lainnya (2023-2026)	unit	12	350,333,000	3	27,736,800	3	13,868,368					3	13,868,368	3	13,868,368	100.00	100.00	6	41,605,168	50	11.88			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor (2021-2022)	unit	40	24,943,732													0	-	0.00	-					
		Jumlah pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor (2023-2026)	unit	80	61,926,500	15	10,265,000	7	4,670,000		1.00	1,300,000		1,340,000	6	2,030,000.00	7	4,670,000	100.00	100.00	22	14,935,000	28	24.12		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		83.81	83.81			98.33	28.25			
Predikat Kinerja																		Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	116,191,994	100	3,939,762	100	3,195,300	-	-	-	-	-	100.00	3,195,300	100.00	3,195,300	100.00	100.00	3	7,135,062	3	6.14		

7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		147	116,191,994	147	3,939,762	147	3,195,300	-	-	-	-	147	3,195,300	147	3,195,300	100.00	100.00	90	7,135,062	61	61.22	Seksi Penerimaan																
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec. Sidalaya			orang	294	69,559,994															0	-	0.00	-																	
				Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat (2023-2026)	laporan	4	46,632,000	1		3,939,762	1	3,195,300					1	3,195,300	1	3,195,300	100.00	100.00	2	7,135,062	50	15.30															
Rata - rata capaian kinerja (%)																				100.00	100.00				61.22	61.22															
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Rendah	Rendah															
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN		persen	100	1,966,737,429	100	292,007,642	100	211,003,500	15.75	33,231,600	7.24	15,270,500	12.90	27,227,700	60.01	126,621,100	95.90	202,350,900	95.90	95.90	196	494,358,542	196	25.14															
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	persen	100	854,506,489	100	172,382,360	100	125,775,700	26.42	33,231,600	-	0	9.80	12,320,600	59.29	74,578,000	95.51	120,130,200	95.51	95.51	196	292,512,560	195.51	34.23															
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang (2021-2022)	orang	200	89,745,500																0	-	0.00	-	Seksi Pembangunan															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum Musrenbang(2023-2026)	Lembaga	28	205,000,000	7	75,616,500	7	65,846,400	7.00	33,231,600	-		2.00	9,217,800	5.00	20,597,000.00	7	63,046,400	100.00	95.75	14	138,662,900	50	67.64															
7.01.03.2.01.02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah buku RKPDex (2021-2022)	buku	21	15,000,000																0	-	0.00	-	Seksi Pembangunan															
			Jumlah buku RKPDex (2023-2026)	dokumen	84	65,000,000	21	36,486,500	21	19,993,700		-			3,102,800	21	16,890,900.00	21	19,993,700	100.00	100.00	42	56,480,200	50	86.89																
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kepwim. Bumdes (2021-2022)	kegiatan	45	152,760,989																0	-	0.00	-	Seksi Ekonomi															
			Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (2023-2026)	laporan	92	327,000,000	23	60,279,360	3	39,935,600.00		-			3	37,090,100.00	3	37,090,100	100.00	92.87	26	97,369,460	28	29.78																	
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100	1,112,230,940	100	119,625,282	100	85,227,800				15,270,500		14,907,100		52,043,100	-	82,220,700	-	96.47	100	201,845,982	100	18.15															
7.01.03.2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina (2021-2022)	Lembaga	10	294,632,940																0	-	0.00	-	Seksi Keras															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina (2023-2026)	Lembaga	20	817,598,000	5	119,625,282	5	85,227,800			15,270,500		14,907,100	2	52,043,100	2	82,220,700	40.00	96.47	7	201,845,982	35	24.69																
Rata - rata capaian kinerja (%)																				95.90	95.90				195.90	25.14															
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Rendah															
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN & KETERTIBAN UMUM			100	627,980,000	100	99,818,791	100	106,904,600	11.41	12,195,000	3.80	4,065,000	30.78	32,909,300	43.07	46,044,300	89.06	95,213,600	89.06	89.06	189	195,032,391	189	31.06															
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman & Ketertiban Umum		bulan	12	491,598,923	12	72,848,740	12	79,196,600	3	12,195,000	3	4,065,000		29,105,800	6	25,430,800	12	70,796,600	100.00	89.39	24	143,645,340	200.00	29.22															
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan Linmas desa se kec. (2021-2022)	orang	50	118,809,000																0	-	0.00	-	Kasi Transib															
			Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal	laporan	48	292,475,667	12	45,918,743	12	48,780,000	3	12,195,000	3	4,065,000	3	20,325,000	3	12,195,000	12	48,780,000	100.00	100.00	24	94,698,743	50	32.38															
7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Konflik Kegiatan Keagamaan yang di Fasilitasi (2021-2022)	orang	28	10,000,000																0	-	0.00	-	Kasi Transib															

			Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (2023-2026)	laporan	48	70,314,256	12	26,929,997	2	30,416,600			-		1	8,780,800	1	13,235,800	2	22,016,600	100.00	72.38	14	48,946,597	29	69.61		
7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan & Pengawasan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah	Presentase pelanggaran yang tertangani	persen	100	136,381,077	100	26,970,051	20.32	27,708,000		-	-	-	13.73	3,803,500	74.40	20,613,500	88.12	24,417,000	433.75	88.12	188	51,387,051	188.12	37.68		
7.01.04.2.02.01		Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Pengesakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan pengesakan Perda dan Perkada (2021-2022)	kali	8	35,060,000																0	-	0.00	-	Kasi Transib		
		Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Pengesakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI (2023-2026)		laporan	32	101,321,077	8	26,970,051	2	27,708,000	-		-			3,803,500	2	20,613,500	2	24,417,000	100.00	88.12	10	51,387,051	31	50.72		
Rata - rata capaian kinerja (%)																					89.06	89.06			189.06	31.06		
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				14,508,000																0	-		-			
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah				14,508,000																0	-		-			
7.01.05.2.01.04		Pembinaan Kerkumun Antarkelu dan Intrakelu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Peserta Pembinaan	peserta	480	14,508,000													-	-	-	0.00	0	-	-	0.00		
Rata - rata capaian kinerja (%)																					0.00	0.00			0.00	0.00		
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		persen	100	532,126,493	100	95,110,284	100	100,077,500	-	-	7.55	7,560,000	26.69	26,710,500	51.40	51,443,500	85.65	85,714,000	85.65	85.65	186	180,824,284	186	33.98		
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa		persen	100	532,126,493	100	95,110,284	100	100,077,500	-	-	7.55	7,560,000	26.69	26,710,500	51.40	51,443,500	85.65	85,714,000	85.65	85.65	186	180,824,284	185.65	33.98		
7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa & Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Peraturan Desa (2021-2022)	buku	42	36,872,000																0	-	0.00	-	Seksi Pemerintahan		
		Jumlah dok. Yg difasilitasi dlm rangka penyusunan Peraturan Desa & Peraturan Kepala Desa (2023-2026)		dokumen	84	62,000,000	21	3,407,743	21	2,610,000						21.00	2,610,000	21	2,610,000	100.00	100.00	42	6,017,743	50	9.71			
7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dBin (2021-2022)	desa	42	45,980,000																0	-	0.00	-	Seksi Pemerintahan		
		Jumlah dok. Yg difasilitasi dlm rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (2023-2026)		dokumen	84	23,495,000	21	43,301,941	21	38,490,500.00		-			8,707,000	21	25,870,000	21	34,577,000	100.00	89.83	42	77,878,941	50	331.47			
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa (2021-2022)	desa	42	40,089,993																0	-	0.00	-	Seksi Pemerintahan		
		Jumlah dok. Yg difasilitasi dlm rangka Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa (2023-2026)		dokumen	84	67,212,000	21	3,279,394	21	3,060,000		-	21	3,060,000		21	3,060,000	21	3,060,000	100.00	100.00	42	6,339,394	50	9.43			



Pelayanan Umum Kecamatan Sidayu



Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN dari Anggota Dewan



Pembinaan Kepegawaian dari BKPSDM



Kegiatan Kebersihan Alon-alon Sidayu



Pertemuan Rutin dan Pembinaan Administrasi KOPWAN



Pelatihan UMKM / Ekonomi Produktif



Kegiatan Pelatihan BUMDesa



Pelatihan UMKM / Ekonomi Produktif



Pembinaan LPTQ



Rapat Koordinasi BPNT



Rapat Koordinasi UKS



Penyaluran Bansos



Pertemuan Rutin TP. PKK



Senam Kesegaran Jasmani



Pra Musrenbang Kecamatan Tahun Anggaran 2026



Musrenbang Kecamatan Tahun Anggaran 2026



Konferensi Kepala Desa



Pelatihan Rencana Anggaran Biaya (RAB)



Sosialisasi Regulasi Penggunaan Dana Desa



Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa



Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



Koordinasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa



Pembinaan Administrasi Keuangan Desa



Monev Pengawasan Pemerintahan Desa



Pemantauan Galian C



Penertiban Warung Liar



Rapat Koordinasi Penegakan Perda



Rapat Koordinasi Sinergitas / Linmas